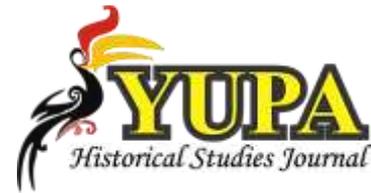


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 4 No. 2, 2020 (82-92)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Konstelasi Politik Pasca Perang Ngali di Bima

Sukarddin¹, Mulyati², Faujiah³

¹IISBUD Samawa Rea, Kabupaten Sumbawa Besar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Dompu, Kabupaten Dompu, Indonesia

³Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Indonesia

¹sukarddinsejarah@gmail.com, ²yhatisweet19@gmail.com, ³faujiahmansyur94@gmail.com

Received	Accepted	Published
19/10/2020	30/12/2020	31/12/2020

Abstract *Sultanate of Bima faces various challenges, especially in the economic and political fields of government. Trade freedom had been the main pillar of the economy, threatened by the Dutch trade monopoly. Sovereignty and territorial integrity are threatened by the "Lange Contract" (long contract) which was imposed by the Dutch colonial government. The agreement "Lange Contract" (long contract) with the Netherlands has made people's anger overflowed. Anger was manifested by the resistance of the people of Ng Ali against occupation of the Netherlands in the years 1908-1909. The purpose of writing this is to examine more deeply about the background behind the constellation of politics in the Sultanate of Bima so that the P groaned Ngali and the impact of P groaned Ngali.*

Keywords: *Politics, the Ngali War, Dutch Colonialism, Bima*

Abstrak Kesultanan Bima menghadapi berbagai tantangan terutama di bidang ekonomi dan politik pemerintah. Kebebasan dagang sebelumnya menjadi pilar utama ekonomi terancam adanya monopoli dagang Belanda. Kedaulatan dan keutuhan wilayah terancam oleh perjanjian "Lange Contract" (kontrak panjang) yang telah dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjanjian "Lange Contract" (kontrak panjang) dengan Belanda tersebut membuat kemarahan rakyat meluap. Kemarahan itu diwujudkan dengan adanya perlawanan rakyat Ngali terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1908-1909. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang konstalasi politik di Kesultanan Bima sehingga terjadinya Perang Ngali, dan dampak Perang Ngali.

Kata Kunci: Konstalasi Politik, Perang Ngali, Penjajahan Belanda, Bima

PENDAHULUAN

Bima adalah sebuah daerah di bagian timur dari pulau Sumbawa dan merupakan kesultanan terpenting di pulau Sumbawa maupun di kawasan pulau-pulau Sunda Kecil pada kurun waktu abad ke 17-19 (Siti Mariam R Salahuddin, 2004:103-104).

Perkembangan perjalanan sejarah suatu bangsa, ikut dipengaruhi oleh keadaan geografis kesultanan Bima sampai abad ke-20, mempunyai batas wilayah, keadaan tanah dan iklim, saling mempengaruhi keadaan hidup dan kehidupan masyarakat. Daerah ini terletak di pulau Sumbawa dibagian timur. Memiliki luas yang diperkirakan 4870 km² atau 1/3 dari luas pulau Sumbawa, sedangkan berdasarkan penjelasan tertulis dalam kontrak Gubernur *Celebes en Onderhoorigheden* (Celebes dan daerah taklukan) dengan sultan Bima pada tahun 1886, luas kesultanan Bima seluruhnya 156 mil persegi (Abdullah Tayib, 1995:11).

Hampir 70% daerah Bima terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan. Pada masa lalu, dataran tinggi dan pegunungan tinggi ditumbuhi hutan tropis yang relatif lebat. Akibat perladangan berpindah, maka akhir-akhir ini luas areal hutan semakin berkurang. Dataran tinggi dan pegunungan sudah banyak yang gundul. Hal ini ikut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Lebih-lebih karena timbul erosi yang dapat merusak kelestarian lingkungan masyarakat.

Dataran rendah yang ada, hanya 14% yang dapat dijadikan daerah pertanian, pada musim hujan juga ditanami dengan tanaman yang tahan panas seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian. Pada saat sekarang ini daerah Bima sudah ditemukan beberapa jenis bahan tambang seperti: emas di daerah Maria kecamatan wawo dan Mangan di daerah pela kecamatan Monta. Keadaan tanah di daerah pesisir banyak menjorok ke bawah, sehingga daerah Bima yang dikelilingi laut banyak mempunyai teluk-teluk seperti: teluk Sanggar, teluk Bima dan teluk waworada. Keadaan pesisir yang demikian sangat menguntungkan bagi pelayaran.

Daerah Bima beriklim panas dan kering, curah hujan amat sedikit, kalau dibanding dengan curah hujan daerah Indonesia bagian barat. Musim kemarau lebih panjang dari pada musim hujan. Sehingga daerah pertanian sering mengalami kekeringan. Sisanya merupakan daerah kering yang hanya cocok untuk usaha peternakan. Keadaan tanah di daerah pesisir banyak yang menjorok ke dalam, sehingga tanah di daerah Bima yang dikelilingi oleh laut banyak terdapat teluk (Sukrin A. Rahman, 2006:33).

Penduduk kesultanan Bima didominasi oleh pemeluk agama Islam. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat Bima sangat taat kepada aturan-aturan Islam. Ketaatan ulama dan masyarakat Bima dalam menjalankan syari'at agama memberi dampak positif

dalam segala aktifitas kehidupan masyarakat. Wajar apabila ulama dan rakyat Bima menentang penjajahan Belanda atau orang kafir karena dalam ajaran Islam diajarkan tentang konsep *jihad fi sabilillah*. Menurut pemahaman mereka berjuang melawan orang kafir dibenarkan dalam Islam bila melalui jihad. ideologi jihad merupakan faktor utama yang memunculkan perlawanan terhadap penjajah Belanda atau dikenal dengan perang Ngali (Yusuf Djakariah, 1995:1).

Perjuangan melawan penjajah di kesultanan Bima sebelum abad ke-20 selalu berpusat di istana di bawah pimpinan sultan dan ulama sebagai pejabat kesultanan. Tetapi sejak awal abad ke-20, pusat perjuangan beralih ke kampung yang dipimpin oleh para tokoh yang mewakili berbagai kelompok sosial. Pada saat itu sultan dan ulama istana berada dalam posisi yang sulit dan serba salah karena pemerintah sudah terikat dengan isi perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) yang dipaksakan oleh Belanda. Setelah abad ke-20 kedudukan Belanda di bidang politik dan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara bertambah kuat. Perlawanan masyarakat yang dipimpin oleh sultan, ulama dan tokoh non formal dapat dilumpuhkan. Perjuangan rakyat Aceh yang sangat ditakuti Belanda pun, mulai tahun 1905 sudah mulai lemah (Suyono, 2003:313-314).

Pada awal abad ke-20, Bima menghadapi berbagai tantangan terutama di bidang ekonomi dan politik pemerintah. Kebebasan dagang sebelumnya menjadi pilar utama ekonomi terancam dengan adanya monopoli dagang Belanda. Kedaulatan dan keutuhan wilayah terancam oleh perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) yang telah dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketertinggalan di bidang pendidikan dan teknologi merupakan faktor utama. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki ialah ketaatan pada agama. Rangkaian permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi oleh kesultanan Bima, tetapi oleh semua kerajaan atau Kesultanan di seluruh Nusantara pada periode tersebut (Hilir Ismail, M, 2003:23-24).

Permasalah-permasalahan tersebut baru benar-benar dirasakan menjadi tantangan berat pada masa pemerintah sultan Abdullah, sultan Abdul Azis yang titik puncaknya pada masa pemerintah sultan Ibrahim. Permasalah lain yang cukup merepotkan sultan Ibrahim ialah Bima tidak lagi memiliki angkatan laut karena sudah dibubarkan oleh Sultan Abdullah. Pertimbangan pembubaran angkatan laut tersebut dikarenakan takut diperalat oleh Belanda untuk menyerang pejuang Makassar sesuai dengan isi kontrak dagang yang ditanda tangani pada masa pemerintahan sultan Abdul Hamid.

Pengaruh Belanda muncul dengan adanya perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) yang mengikat Bima dalam berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia-Belanda. Perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) dengan Belanda

tersebut membuat kemarahan rakyat meluap. Kemarahan itu diwujudkan dengan adanya perlawanan rakyat Bima yang menjalar di tiga tempat, yaitu perang Ngali, Dena dan Kala. Perlawanan tersebut merupakan wujud dari sebuah penjajahan langsung oleh Belanda terhadap Kesultanan Bima. Hal ini menyadarkan Belanda bahwa Islam di manapun tidak bisa dijajah dengan mudah karena Islam memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Bima. Perang Ngali merupakan gejala sosial, agama, ekonomi, dan politik yang terjadi karena adanya rongrongan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Perang Ngali merupakan peristiwa lokal atau sebuah sejarah lokal yang memiliki berbagai dimensi permasalahan. Perang tersebut dikatakan sebagai sebuah sejarah konvensional atau sejarah desa.

METODE

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian historis. Louis Gotschalk (1986:34) Langkah-langkah dalam penelitian sejarah sebagai berikut: heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Penulisan ini bersifat studi kepustakaan dalam memperoleh sumber informasi dapat melalui sumber antara lain; penulisan berupa buku, laporan penulisan, jurnal, maupun dokumen. Menurut klasifikasi sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu; sumber primer dan sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ngali merupakan sebuah perkampungan yang sudah lama dihuni oleh masyarakat setempat. Pada waktu itu kampung Ngali merupakan sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Galarang, orang yang dianggap hebat dan berpengaruh bagi masyarakat Ngali. Di sebelah timur desa tersebut terdapat gunung Kabuju dan terdapat satu pohon besar. Di sebelah selatan terdapat gunung Tonggondoa (Syarifuddin Jurdin, 2006:211). Di sebelah utara agak ke timur terdapat gunung yang berbatasan langsung dengan Monta atau Tolo Monta.

Bila kita lihat lebih lanjut kampung Ngali telah dihuni oleh manusia sebelum adanya kesultanan Bima yang masih dikenal dengan sebutan *Ncuhi* pada masa itu. Bukti dari hal tersebut dapat kita lihat sampai saat ini antara kampung Ngali dan kampung Renda terdapat suatu prasasti kuno yang dikenal dengan *Wadu Nocu* (batu lesung). Sedangkan bukti ini sulit terbantah oleh orang lain karena sejarah kebudayaan masyarakat Bima tetap memasukkan *Wadu Nocu* (batu lesung) sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat telah ada sebelum Bima terbentuk.

Masyarakat Ngali dan masyarakat Renda telah ada sebelum berdirinya kesultanan Bima. Sejarah masyarakat Ngali yang paling dikenal luas oleh orang lain adalah ketika masyarakat Ngali melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu Galarang Ngali Salasa Ompu Kapa'a bersama rekan-rekannya memberikan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan sultan Ibrahim pada saat itu sudah ditaklukkan duluan oleh pemerintah kolonial Belanda tetapi sebagian rakyat Bima terutama tiga desa yang digerakkan oleh Ngali memberikan perlawanan yang hebat karena pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan aturan yang sangat bertentangan dengan keyakinan masyarakat Ngali, dimana pemerintah kolonial Belanda berkeinginan untuk menarik pajak hasil bumi rakyat Bima. Dengan adanya aturan seperti itu membuat masyarakat Ngali kecewa sehingga terjadinya mobilisasi massa besar-besaran dari kampung-kekampung untuk memberikan perlawanan kepada "*Dou Kafir*" (orang kafir) dan takbir di mesjid raya Ngali.

Pada tahun 1905 sultan Bima mengadakan perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1886-1915 sultan Ibrahim memerintah, peristiwa juga terjadi serupa di tempat-tempat lain. Sultan Ibrahim berada dalam posisi serba sulit karena sultan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh para bangsawan, ulama dan tokoh rakyat bersama masyarakat adalah suatu perjuangan, tetapi sultan Ibrahim tetap mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat Bima walaupun posisinya serba sulit. (M. Hillir Ismail, 2004: 148).

Sultan Ibrahim mengadakan pertemuan di Palibelo dengan Galarang yang terdapat di kenjeneliat kesultanan Bima, berdasarkan hasil peretemuan tersebut, maka mereka membulatkan tekad untuk sama-sama memberikan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sebelum memberikan perlawanan maka Galarang Salasa Ompu Kapa'a, ulama, pemuka masyarakat dan golongan bangsawan melakukan peretemuan kembali dengan masyarakat yang bertepatan di mesjid raya desa Ngali.

Pertemuan ini membicarakan berbagai strategis dan konsekwensi yang harus diambil masyarakat pada saat melakukan perlawanan, untuk menghadapi kekuatan Belanda yang mungkin akan menyerang mereka dari utara dan barat. Tokoh-tokoh tersebut melakukan penggalangan kekuatan massa diberbagai desa sehingga terkumpulah beribu-ribu orang yang siap melawan Belanda (Achad Djakariah, 1991:50). Massa tersebut bukan saja berasal dari desa Ngali tetapi dari desa-desa lain dalam Kejenelian Belo, antara lain dari desa Renda, Roi, Roka, Ncera dan Lido.

Pada waktu itu, salah satu tokoh perang Ngali adalah Abbas Daeng Manasa, yang berperan sebagai panglima perang dan dibantu oleh para ulama-ulama yang tidak mau

tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Para ulama menyerukan kepada masyarakat agar serentak memberikan perlawanan kepada “*Dou Kafir*” (orang kafir). Menurut mereka orang Islam haram tunduk kepada orang kafir. Sedangkan dalam buku Sunda kecil dengan jelas menguraikan perang Ngali bahwa rakyat menganggap “*haram*” menerima dan tunduk di bawah perintah orang kafir. Dalam tahun ini timbullah pemberontakan di daerah kesultanan Bima dibawah pimpinan seorang keturunan bangsawan. Pemberontakan ini dikenal dengan nama “Perang Ngali”. Pelopor itu adalah bernama Abbas, putra Abubakar Daeng Manasa, lahir dan diam di kampung Nata distrik Belo. (Hilir Ismail, M, 1975:55-56).

Massa mulai berbondong-bondong datang dan berkumpul di mesjid Raya Ngali, maka para ulama dan pimpinan perang memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa perang melawan “*Dou Kafir*” (orang kafir) apalagi penjajahan kolonial Belanda hukumnya wajib dalam ajaran Islam. Bila melalui *Jihad Fii Sabilillah*. Para tokoh-tokoh perang Ngali di atas bersama-sama memimpin massa untuk melakukan takbir dan tahlil menegelilingi kampung sebagai tanda dimulainya perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Selama tiga hari tiga malam mereka mengadakan takbir keliling Di perkampungan sebagai tanda dimulainya perang melawan pemerintah kolonial Belanda (Pemerintah, 1978/1979:44) Takbir dan tahlil inilah mereka gunakan membangkitkan semangat masyarakat dengan semboyan menerima Belanda berarti dijajah, dijajah Belanda berarti kafir, berperang dengan kafir berarti sabil. Mereka semua bertekad untuk mati syahid di jalan Allah.

Setelah sultan Ibrahim mendengar informasi bahwa pemerintah kolonial Belanda akan menyerang mereka. Maka sultan Ibrahim langsung mengirim utusan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat Ngali bahwa dalam waktu dekat pemerintah kolonial Belanda akan menyerang. Mendengar berita tersebut, maka masyarakat bersiap-siap menunggu serangan dari pasukan kolonial Belanda. Pada saat itu massa di Ngali tengah mempersenjatai dirinya dengan senjata tradisional seperti tombak, keris, pedang, dan benda tajam lainnya serta ada beberapa pucuk senjata sederhana lainnya. Seiring dengan perkembangan dan persiapan perang di Ngali, pemerintah kolonial Belanda menghasut dan merealisasikan politik adu domba di kesultanan Bima dengan membentuk pasukan kerajaan yang akan menghukum masyarakat Ngali karena mereka sudah berani melawan sultan Ibrahim. Pasukan tersebut dibentuk dengan dalih menegakkan wibawa sultan sebagai pemimpin yang ada di kesultanan Bima (Abdullah Tayib, 1995:263) Walaupun tujuan akhirnya untuk kepentingan pemerintah Belanda karena melalui mereka Belanda dapat mengetahui besarnya kekuatan masyarakat Ngali.

Perang Ngali telah berakhir karena perlawanan masyarakat Ngali dapat dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tipu muslihat dan siasat kotor yaitu dengan memeralat sultan Ibrahim. Sehingga impian pemerintah kolonial Belanda yang dituangkan dalam perjanjian *Lange Contract* (kontrak panja) bisa mulai direalisasikan di kesultanan Bima (Yusuf Dzakariah, 1995:30) dengan kemenangan tersebut, pemerintahan kolonial Belanda sangat bahagia terutama Gubernur Jenderal di Batavia yang menerima berita kemenangan tersebut, bahwa pada tanggal 20 Januari 1909 kesultanan Bima telah ditaklukkan. Pada tanggal 21 Januari 1909 pihak Belanda merayakan kemenangan tersebut dengan meletuskan meriam 25 kali. Kemenangan tersebut menjadi sebuah kemenangan yang sangat menguntungkan pihak Belanda (Syarifuddin Jurdin, 2006:218).

Setelah perang Ngali berakhir, maka para pemimpin perang Ngali yang ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat perang akan di bawa dihadapan sultan. Dan akan diberikan hukuman masing-masing membayar denda sebanyak 70 ekor kerbau jantan. Jika dilihat dari aturan yang berlaku di dalam kesultanan Bima, bila ada seseorang yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah akan dihukum mati atau hukuman buang seumur hidup. Dalam kenyataannya ketentuan hukum tersebut tidak diberlakukan terhadap para tokoh yang terlibat dalam perang melawan Belanda. Sultan menganggap bahwa perlawanan masyarakat Ngali bukan melawan kesultanan Bima, tetapi melawan pemerintah kolonial Belanda (Hilir Ismail, 1989:152). Perlawanan masyarakat Ngali tetap memberikan beban kepada masyarakat yaitu pajak dan kerja rodi. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan bahwa tokoh perang Ngali tidak diperkenankan tinggal di perkampungan-perkampungan lagi, untuk mencegah terjadi perlawanan yang serupa di kemudian hari. Mereka ini harus tinggal disekeliling sultan.

Kedaaan Politik

Awal berdirinya pemerintahan kolonial Belanda di kesultanan Bima setelah mereka mendapatkan kemenangan atas gerakan perlawanan masyarakat Ngali. Sehingga pemerintah kolonial Belanda menerapkan pemerintah langsung di kesultanan Bima, dimana Belanda memberikan hak otonomi kepada kesultanan Bima. Walaupun tetap dibawa pengawasan pemerintah kolonial Belanda.

Sejak saat itu pula Belanda mulai menerapkan konsep politik pemerintah kolonialnya dalam pemerintah kesultanan Bima (Abdullah Tayeb, 1995:276). Pelaksanaan sistem pemerintah kolonial membawa akibat bagi perubahan organisasi pemerintah kesultanan Bima. Perubahan dilakukan dengan mengurangi dan menghilangkan

kekuasaan serta kewenangan tertentu dari perangkat hukum pemerintah di kesultanan Bima.

Ada beberapa struktur pemerintah dan tata hukum yang diubah dan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu: (1). Komponen Majelis Hadat yang beranggotakan 12 orang dikurangi hingga menjadi dua orang saja, yaitu Sultan dan Ruma Bicara; (2). Kekuasaan Majelis Hadat dipersempit hanya mengurus badan peradilan kerajaan yang berpedoman pada hukum Hindia Belanda; (3). Kekuasaan Majelis Tureli sebagai badan harian pemerintahan kesultanan ditekan sedemikian rupa hingga mencapai titik pembekuan perangkatnya dan diganti dengan Dewan Pemerintahan Belanda; (4). Majelis Mahkamah Syar'iyah dihapus dan diganti dengan peradilan Hindia Belanda, tujuannya untuk menghalangi orang Bima akrab dengan pelaksanaan hukum Islam, dan berusaha menghilangkan sendi-sendi hukum Islam dalam kehidupan pemerintah kesultanan Bima. Sehingga struktur kesultanan di samakan dengan pemimpinan kepala kejenelian atau distrik lainnya. Dalam menjalankan kewajiban pemerintahan di masing-masing distrik di kesultanan Bima diserahkan tanggung jawab kepada Jeneli dan pembantu serta galarang-galarang dan kepala kampung.

Keadaan Sosial

Perang Ngali telah merenggut jiwa terbaik desa pada zamannya. Perang ini juga menimbulkan pengorbanan yang besar baik moril maupun material (Yusuf Djakarrah, 1995:2). Setelah Perang Ngali berakhir, maka pemerintah kolonial Belanda dengan leluas menerapkan sistem *belasting* kepada masyarakat Bima. Bahkan kerja paksa dan kerja rodi diterapkan dengan menggunakan istilah manis didengar, namun pahit dirasakan, yaitu *herendienst* (kerja rodi untuk keperluan tuan tanah) dan kerja *hamente* (kerja rodi bagi rakyat yang tidak mampu membayar *belasting* dengan membawa bekal kehidupan sehari).

Penerapan kerja paksa dan kerja rodi tersebut, mengakibatkan rakyat di kesultanan Bima semakin menderita. Kondisi rakyat Bima pada waktu itu sangat sengsara karena mereka sulit membayar pajak *belasting* yang diterapkan f 2,50 perorang dewasa dalam setahun. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga dicukup-cukupkan sebenggol dan banyak pula yang berpuasa senin-kamis. Hampir seluruh masyarakat Bima tidak pernah menggenggam uang dengan nominal satu ketip (f 0,10) apalagi uang rupiah dan ringgit (f 1 dan f 2,50). Rakyat Bima mengetahui pecahan mata uang rimis, sen, gobang, kelip, ketip, rupiah dan uang mas melalui mata pelajaran berhitung di sekolah desa untuk pengetahuan berhitung (Abdullah Tayib, 1995:287).

Keadaan Agama

Pada tahun 1906 kesultanan Bima sudah lama dijadikan daerah jajahan pemerintah kolonial Belanda tetapi dalam pemerintah tetap berlaku hukum atau sistem pemerintah sebelumnya, yaitu hukum adat atau Syara Hukum dilakukan oleh lembaga Mahkamah Syari'iyah. Setelah mendapat kemenangan atas Perang Ngali, pemerintah Belanda mulai menerapkan hukum pemerintah kolonial Belanda di kesultanan Bima. Pada saat itu mulai dilakukan penghapusan terhadap hukum Islam atau Mahkamah Syar'iyah di kesultanan Bima. Akibat penghapusan Mahkamah Syar'iyah ini, maka sejak tahun 1908 itu pula mulai terjadi kekosongan secara institusional peradilan agama di Bima.

Pada saat itulah hukum Islam di kesultanan Bima mengalami perubahan seperti masalah yang berkaitan dengan perkara pidana. Mengenai putusan yang diancam dengan hukuman mati, hukum potong tangan, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perkosaan mulai saat itu dialihkan atau ditugaskan kepada majelis rapat besar, rapat tengah, dan rapat rendah (Pemerintah, 1977/1978:141). Majelis ini merupakan pengadilan yang sengaja dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda menggantikan hukum Islam di kesultanan Bima agar hukum Islam dijauhkan dalam kehidupan rakyat Bima. Keadaan ini berlangsung sampai masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan berlanjut hingga pembentukan Badan Hukum Syara pada tahun 1947. Kekosongan lembaga peradilan agama ini berarti terjadi kekosongan penegakana hukum Islam di kesultanan Bima sehingga terjadi penumpukan kasus dan sengketa hukum masyarakat Bima.

Pada masa sebelum tahun 1908 kepengurusan mesjid dipusatkan pada Mahkamah Syar'iyah. Setelah adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda di Bima, mesjid lepas dari perhatian pemerintah kesultanan sehingga lepas dari pemeliharaan atau kepengurusan. Bahkan penggunaan mesjid cenderung menjauh dan hanya sekedar untuk sholat Jum'at saja. Mesjid tidak lagi dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah dan pengajian. (Abdul Gani Abdullah, 2004:160) Masalah lain yang muncul adalah adanya perebutan hak untuk dapat menguburkan keluarga atau anak keluarga di halaman mesjid. Keadaan ini menambah jumlah kuburan di lingkungan mesjid sehingga dapat menumbuhkan suasana yang menakutkan dan menjadi salah satu sebab masyarakat menjauh dari mesjid.

KESIMPULAN

Masyarakat Ngali telah lama dihuni oleh manusia sebelum kesultanan Bima dengan dikenal *Ncuhi*. Bukti dari hal tersebut adalah bahwa antara kampung Ngali dan kampung

Renda terdapat suatu prasasti yang dikenal dengan *Wadu Nocu* (batu lesung). Bukti ini sulit terbantah karena sejarah kebudayaan masyarakat Bima tetap memasukkan *Wadu Nocu* (batu lesung) sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat telah ada sebelum Bima terbentuk.

Perjanjian *Lange Contract* (kontrak panjang) ini Belanda memberlakukan peraturan pajak dan sekaligus menguasai kesultanan Bima sehingga perjanjian ini sangat merugikan kesultanan Bima. Perjanjian tersebut menjadi sebab terjadinya perlawanan masyarakat Ngali yang anti kepada pemerintah kolonial Belanda. Akibat kemenangan pemerintah kolonial Belanda, maka di kesultanan Bima terjadi perubahan aturan dan sistem pemerintah Islam diubah menjadi sistem pemerintah Hindia Belanda. Hal ini juga, diperparah dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kerja paksa dan kerja rodi di kesultanan Bima.

Perang Ngali di atas, telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat di kesultanan Bima. Baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan agama maka berakhirnya perang Ngali, pemerintah kolonial Belanda dengan leluas mulai menjalankan isi perjanjian yang tercantum dalam *Lange Contract* (kontrak panjang) dimana pemerintah kolonial Belanda mengambil kebijakan mengubah aturan di kesultanan Bima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pada masyarakat Ngali pada umumnya dan terkhusus kepada tokoh masyarakat, adat, agama yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

- Abdullah Tayib. (1995). *Sejarah Dana Mbojo Bima*. Jakarta: Harapan Masa PGRI.
- Abdul Gani Abdullah. (2004). *Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957)*. Mataram: Lengge.
- Achmad Djakariah. (1991). *Sekilas Perang Dena*. Naskah yang Tidak diterbitkan.
- Gottschalk, Louis. (1969). *Understanding of History*, a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hilir Ismail, M. (1975). *Peranan Bima dalam Penyebaran Agama Islam di Nusa Tenggara*. Jakarta: Institut Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah. Skripsi yang tidak diterbitkan.

- M. Fachrir Rachman. Ma. (2009). *Islam di Bima*. Jl. Wonosaari Km. 5 Gg. Panda Wangi. Yogyakarta.
- Muslimah Hamzah. 2004. *Pulau-Pulau Surga*. Dalam *Eksiklopedia Bima*. Raba: Pemerintah Kabupaten Bima.
- M. Hilir Ismail. (2004), *Peran Kesultanan Bima*. Jl. Gunung Agung I Mataram 831124 Nusa Tenggara Barat-Indonesia. Pemerintah. 1997/1978. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Pemerintah. (1997/1978). *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Syarifuddin Jurdin. (2006). *Islam, Ideologi dan Demokrasi di Bima*. Buku yang belum diterbitkan.
- Sukrin A Rahman. 2006. *Kesultanan Bima: Peranannya dalam Proses Islamisasi di Bima Nusa Tenggara Barat (1630-1742)*. (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta).
- Siti Mariam Salahuddin. 2004. *Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima*. Yogyakarta: Lenge.
- Suyono. 2003. *Peperangan Kerajaan Nusantara: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yusuf Djakariah. (1995). *Sejarah Singkat Perang Ngali*. Naskah tidak diterbitkan.